



## **Political Lobbying Walhi terhadap Krisis Banjir Bandang di Sumatera**

**Neima Aulia<sup>1\*</sup>, Ahmad Mujammil Raza<sup>2</sup>, Aditia Saputra<sup>3</sup>, Winda Dwi Astuti Zebua<sup>4</sup>**

<sup>1-4</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [neimaaulia1705@gmail.com](mailto:neimaaulia1705@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** The Indonesian Forum for the Environment (WALHI) responded to the flash flood crisis in Sumatra at the end of 2025. The floods were triggered by massive deforestation and the failure of environmental governance, highlighting the urgency of shifting the paradigm from an anthropocentric discourse (natural disasters) to an ecocentric one (ecological disasters). This study aims to analyze how WALHI utilized the momentum of the crisis to reframe public discourse while also using it as an effective political lobbying tool. The research methods used were descriptive qualitative and data analysis of conventional media (framing) and documentation. The results of the study found that WALHI implemented an integrated public affairs strategy. By shifting the public narrative through media campaigns, it then translated this into political pressure through direct lobbying of the Ministry of Forestry and Commission IV of the Indonesian House of Representatives. This strategy succeeded in pushing for concrete policies such as the revocation of 22 forest management permits and the formation of an investigative working committee in the House of Representatives. The research findings offer an integrative advocacy model for civil society organizations, showing that a combination of effective discourse framing and structured political lobbying can transform ecological crises into substantive policy changes.

**Keywords:** Crisis; Environmental Policy; Political Lobbying; Public Affairs Strategy; WALHI

**Abstrak.** Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merespons krisis banjir bandang di Sumatera akhir 2025. Banjir yang terjadi dipicu oleh deforestasi hutan besar-besaran dan kegagalan tata kelola lingkungan tersebut menyoroti urgensi pergeseran paradigma dari wacana antroposentris (bencana alam) menuju ekosentris (bencana ekologis). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara WALHI memanfaatkan momentum krisis untuk membingkai ulang wacana publik sekaligus menggunakan sebagai alat lobi politik yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan analisis data pada media konvensional serta dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa WALHI menjalankan strategi *public affairs* terpadu. Dengan menggeser narasi publik melalui kampanye media, kemudian menerjemahkannya menjadi tekanan politik melalui lobi langsung (*direct lobbying*) kepada Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI. Strategi tersebut berhasil mendorong kebijakan konkret seperti pencabutan 22 izin pengelolaan hutan dan pembentukan panja investigatif di DPR. Temuan penelitian menawarkan model advokasi yang integratif bagi organisasi masyarakat sipil, menunjukkan bahwa kombinasi antara pembingkai wacana yang efektif dan lobi politik terstruktur dapat mentransformasi krisis ekologis menjadi perubahan kebijakan yang substantif.

**Kata kunci:** Kebijakan Lingkungan; Krisis; Lobi Politik; Strategi Public Affairs; WALHI

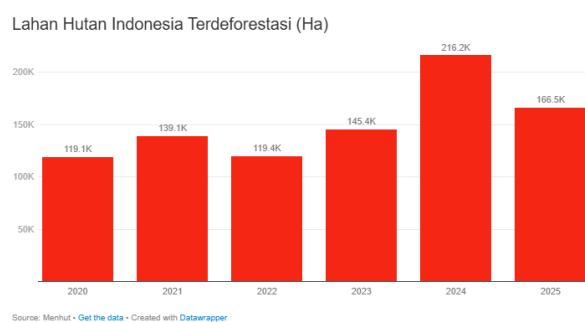
### **1. LATAR BELAKANG**

Krisis banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir tahun 2025 menjadi salah satu bencana ekologis terbesar bagi Indonesia dalam satu dekade terakhir. Sejumlah media konvensional nasional maupun internasional secara luas memberitakan kondisi banjir tersebut, seperti pemberitaan yang diterbitkan oleh artikel [Antara News](#) menjelaskan bahwa penyebab peristiwa banjir bandang ini tidak hanya berasal dari faktor curah hujan yang tinggi, tetapi juga kerusakan lingkungan akibat deforestasi atau penggundulan hutan, alih fungsi lahan, lemahnya tata kelola sumber daya alam, serta buruknya pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Cara pandang masyarakat modern atau lebih dikenal dengan antroposentris juga menjadi akar masalah terjadinya peristiwa banjir bandang ini. Manusia menempatkan dirinya

seolah-olah adalah sebagai pusat, ukuran, dan tujuan dari segala sesuatu di dunia. Jika dipahami lebih dalam dari konteks ilmu lain, tidak hanya manusia saja yang hidup di muka bumi ini, justru hewan dan tumbuhan menjadi makhluk yang juga perlu diperhatikan kebutuhan dan hak-haknya dalam ekosistem agar tidak terjadi bencana lain yang lebih buruk. Oleh karena itu, cara pandang tersebut yang menjadikan alasan bagi pelaku untuk membuat keputusan-keputusan yang merugikan makhluk hidup lain termasuk manusia secara luas (Antara News, 2026).

Tingkat deforestasi hutan pada kurun waktu lima tahun terakhir juga meningkat tajam, terutama pada daerah yang terdampak banjir bandang, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data terkait dengan deforestasi hutan yang dibuka oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam artikel [CNBC Indonesia](#) menampilkan bahwa pada periode Januari hingga September 2025 tingkat deforestasi Indonesia sebesar 166.450 hektar are (Ha).



**Gambar 1.** Data Penggundulan Hutan dari 2020 - 2025 yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Mengalami Penurunan Pada Tahun 2025.

Sumber: Menhut, [cnbcindonesia.com](#).

Data tersebut belum terhitung hingga akhir tahun 2025, namun angka tersebut telah meningkat sebesar 28 persen atau sebanyak 47.358 Ha dari jumlah hutan yang telah digunduli pada 2020 seluas 119.092 Ha. Meskipun luas lahan hutan yang terdeforestasi mengalami penurunan dari 49.766 atau 23,01 persen dari 2024 yang mencapai 216.216, dampak dari penggundulan hutan tersebut begitu terasa dan menjadi krisis bagi pemerintah pusat hingga daerah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan salah satu aktor atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyuarakan kritik kepada pemerintah terkait dengan isu lingkungan yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1980. [WALHI](#) mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menjadi aktor di balik penyebab hutan yang terdeforestasi. Perusahaan yang diidentifikasi dari berbagai sektor, seperti kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Selain itu, penyebab utama dari peristiwa ini berasal dari pertambangan dan pengosongan lahan untuk perusahaan kelapa sawit secara ilegal. Oleh karena itu, WALHI mendesak Kementerian Kehutanan untuk

mencabut seluruh perizinan berusaha sektor kehutanan di tiga provinsi terdampak banjir bandang. WALHI juga meminta Kementerian Kehutanan untuk membuat Satuan Tugas (Satgas) Evaluasi Perizinan dan Aktivitas Ilegal di Kawasan Hutan agar peristiwa serupa tidak terjadi di wilayah lain.

Pola komunikasi yang diimplementasikan teridentifikasi ke dalam praktik *political lobbying* melalui pendekatan *public affairs*, khususnya dengan memanfaatkan media sebagai alat untuk pembentukan opini publik. Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan landasan yang cukup mengenai pola advokasi yang dijalankan oleh WALHI. Penelitian oleh Wahyuni et al. (2024) mengungkapkan bahwa strategi advokasi melalui beberapa jalur, meliputi investigasi, edukasi, kampanye media, dan pendekatan hukum yang dapat mendorong respons pemerintah daerah terhadap kasus *stockpile* batubara ilegal. Temuan ini mengindikasikan kapasitas WALHI dalam menggunakan media sebagai alat untuk menekan publik, namun penelitian ini lebih berfokus pada tahapan advokasi konvensional dan belum menyoroti dimensi *political lobbying* yang terstruktur dalam kondisi krisis berskala nasional.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Toboroza et al. (2025) memperkuat bukti bahwa pendekatan hukum (*litigation*) dapat menjadi instrumen efektif dalam *public affairs* WALHI, yang berhasil mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan tata ruang dan drainase. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kemenangan di tingkat pengadilan tidak secara langsung diikuti dengan kebijakan yang responsif, mengisyaratkan perlunya strategi komunikasi politik yang lebih intensif untuk mengubah kemenangan hukum menjadi perubahan kebijakan yang nyata. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam peran *framing* media dalam membangun opini publik dan mendorong *political will* di tengah krisis besar.

Objek penelitian serupa juga dilakukan oleh Fasmalia & Angela (2024) menawarkan perspektif yang lebih kompleks melalui kerangka *Transnational Advocacy Network* (TAN), menunjukkan respon WALHI Jawa Barat yang memanfaatkan jaringan global, informasi yang terverifikasi, dan tekanan akuntabilitas untuk membantalkan izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A. Penelitian yang dilakukan mengkonfirmasi kecanggihan WALHI dalam mengelola isu lingkungan melalui *information politics* dan *leveraged networks*. Akan tetapi, konteks kajian yang dilakukan hanya terbatas pada proyek infrastruktur energi, dan belum menjawab bagaimana strategi serupa diterapkan dalam merespons bencana ekologis yang tak terduga sehingga diperlukannya narasi krisis yang cepat, memediasi, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya *gap* yang belum sepenuhnya membahas mengenai praktik *political lobbying* yang dijalankan oleh WALHI melalui pendekatan *public affairs*, terutama dalam situasi krisis ekologis akut yang menjadi sorotan media nasional dan internasional. Krisis banjir bandang yang terjadi di Sumatra pada akhir tahun 2025 disebabkan oleh deforestasi yang sangat luas dan ketidakberhasilan dalam pengelolaan lingkungan, menjadikannya situasi yang menarik untuk diteliti. Studi ini mengkaji cara WALHI memanfaatkan krisis dengan membangun narasi bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan akibat kebijakan yang gagal, serta memanfaatkan liputan media internasional untuk menekan pemerintah secara terencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik WALHI untuk menggeser wacana publik dari yang berpusat pada manusia (antroposentrism) menjadi berpusat pada ekosistem (ekosentris), sekaligus memanfaatkan pergeseran pandangan publik itu sebagai alat lobi yang efektif guna mencapai perubahan kebijakan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Public Relations**

*Public Relations* merupakan fungsi manajemen untuk membangun hubungan baik antara organisasi dengan publik eksternal seperti pelanggan, komunitas, serta media massa (Duhé, 2022). Praktik ini berfokus pada interaksi dengan audiens luar guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan (Duhé, 2022). *Public Relations* berfungsi sebagai penghubung yang mengelola aliran informasi antara organisasi dan lingkungannya (Harris & Fleisher, 2017). Keberhasilan strategi komunikasi ini bergantung pada kemampuan praktisi dalam menyelaraskan ekspektasi publik dengan arah strategis perusahaan (Duhé, 2022). Praktisi menjalankan peran sebagai penjembatan yang mengatur pertukaran informasi antara pihak internal dan eksternal (Harris & Fleisher, 2017).

### **Public Affairs**

*Public Affairs* adalah fungsi kepemimpinan strategis untuk mengelola risiko serta menciptakan peluang bagi perusahaan melalui pengaruh pada kondisi sosial politik (Harris & Fleisher, 2017). Fungsi ini mencakup manajemen isu, hubungan pemerintah, serta tanggung jawab sosial perusahaan (Duhé, 2022). Fokus utama *Public Affairs* adalah menyeimbangkan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial demi keberlangsungan bisnis (Duhé, 2022). Praktisi *Public Affairs* menggunakan keahlian negosiasi serta jaringan luas untuk beroperasi dalam lingkungan kebijakan publik (Harris & Fleisher, 2017). Integrasi fungsi ini ke dalam

manajemen lini sangat krusial agar kegiatan komunikasi memberikan kontribusi nyata bagi kinerja organisasi (Harris & Fleisher, 2017).

### **Political Lobbying**

*Political Lobbying* adalah bagian dari aktivitas *public affairs* yang bertujuan mempengaruhi keputusan pemerintah secara langsung (Duhé, 2022). Aktivitas ini menggunakan strategi komunikasi untuk menyampaikan posisi atau argumen organisasi kepada para pembuat kebijakan (Harris & Fleisher, 2017). Lobi politik berfungsi meyakinkan otoritas publik agar mendukung kebijakan tertentu yang sejalan dengan kepentingan organisasi (Harris & Fleisher, 2017). Strategi lobi yang efektif mengandalkan penggunaan sumber daya secara tepat serta wawasan mendalam mengenai proses kebijakan publik, serta praktik lobi menuntut kredibilitas tinggi agar hubungan dengan pejabat publik tetap terjaga secara profesional (Harris & Fleisher, 2017). Berdasarkan konteks *public affairs* yang dijalankan oleh WALHI, salah satu elemen di dalamnya adalah *policy advocacy*. *Public affairs* memiliki tujuan untuk memengaruhi kebijakan publik, membangun dan mempertahankan reputasi organisasi, serta, menemukan titik temu dengan *stakeholder* (Harris & Fleisher, 2016). *Policy advocacy* yang dilakukan oleh setiap organisasi atau komunitas *public affairs* adalah dengan cara melobi, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*grassroot*).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis strategi komunikasi WALHI dalam membingkai isu banjir bandang di Sumatera sebagai bagian dari upaya political lobbying berbasis wacana kebijakan lingkungan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana WALHI membangun narasi ekosentris dalam pemberitaan media guna memengaruhi opini publik dan menciptakan tekanan kebijakan terhadap pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan dengan metode media monitoring terhadap pemberitaan media daring kredibel, studi literatur terkait komunikasi politik, *public affairs*, dan kebijakan lingkungan, serta dokumentasi kebijakan yang relevan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis terhadap strategi komunikasi WALHI menunjukkan upaya sistematis untuk mengubah persepsi publik mengenai banjir bandang di Sumatera. Pemerintah pada awalnya membungkai peristiwa ini sebagai dampak anomali cuaca atau Siklon Tropis Senyar. WALHI

merespons dengan narasi tanding yang kuat bahwa bencana tersebut adalah hasil akumulasi kebijakan yang keliru, bukan sekadar fenomena alam.

Rianda Purba, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, memberikan pernyataan tegas yang menjadi landasan ideologis gerakan ini. Dalam rilis medianya, ia menyatakan:

*"Banjir dan longsor yang terjadi bukan hanya soal hujan lebat. Ketika hutan di hulu hilang, mangrove di pesisir rusak, dan daerah tangkapan air berubah fungsi, maka bencana tinggal menunggu waktu. Ini bukan takdir, tetapi hasil dari kebijakan yang salah arah"* (BETAHITA, 2026).

Pernyataan ini menegaskan posisi WALHI yang menolak fatalisme. Banjir dipandang sebagai konsekuensi logis dari hilangnya fungsi ekologis hutan. Uli Artha Siagian, Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional, memperkuat argumen ini dengan menunjuk bukti fisik di lapangan yang menyoroti adanya ribuan gelondongan kayu atau logging yang hanyut bersama air bah dan menghantam pemukiman warga. Kehadiran material kayu sisa penebangan ini dijadikan bukti forensik oleh WALHI untuk membantah klaim bahwa hutan di hulu masih dalam kondisi baik (Mongabay, 2025). Hal ini juga dipertegas oleh perwakilan organisasi WALHI ketika menjadi narasumber pada acara *Breaking News* Kompas TV.



**Gambar 2.** Perwakilan Organisasi WALHI yang Membantah Pemerintah bahwa Banjir Sumatera Disebabkan Oleh Ailih Fungsi Lahan dan Deforestasi Hutan.

Sumber: Youtube Kompas TV Pontianak.

Dokumen Legalisasi Bencana Ekologis berisikan bahwa WALHI secara eksplisit menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah sebuah "peristiwa bencana" yang dipicu oleh aktivitas industri ekstraktif dan operasi ilegal yang dibiarkan oleh negara (WALHI, 2025). Narasi ini berhasil memaksa media dan publik untuk melihat krisis ini sebagai bencana ekologis atau *ecological disaster* daripada sekadar bencana hidrometeorologi biasa.

Strategi lobi WALHI dijalankan melalui pendekatan *direct lobbying* dengan jalur ganda atau *dual-branch* dengan menasari Kementerian Kehutanan sebagai eksekutif dan Komisi IV DPR RI sebagai legislatif. Tujuannya adalah menciptakan tekanan politik yang memaksa negara mengambil tindakan korektif.

WALHI memanfaatkan momentum krisis untuk mendesak Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, agar bertindak melampaui sekadar retorika keprihatinan. Tuntutan utama WALHI adalah penegakan hukum yang konkret. Uli Artha Siagian menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya respons aparat dalam sebuah pernyataan keras:

*"Hal yang disayangkan mengapa Kementerian Kehutanan maupun kepolisian tidak melakukan penegakan hukum yang tegas. Apabila tindakan ilegal ini ditindak dan dihentikan dari dahulu, dampak besar seperti yang terjadi saat ini kemungkinan tidak terjadi"* (WALHI, 2025).

Tekanan ini membuat hasil ketika Menteri Raja Juli Antoni akhirnya mengumumkan pencabutan 22 izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dengan total luas lebih dari 1 juta hektare pada pertengahan Desember 2025 (BPMI Setpres, 2025). Langkah ini diklaim pemerintah sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menertibkan kawasan hutan. Namun, WALHI tidak langsung merasa puas., langkah ini masih bersifat parsial jika tidak diikuti dengan audit menyeluruh dan pemulihan ekosistem. WALHI menuntut agar lahan yang izinnya dicabut tidak sekedar menjadi tanah tak bertuan, melainkan dikembalikan fungsinya atau didistribusikan kepada rakyat melalui skema perhutanan sosial.

WALHI juga secara spesifik mendesak pembentukan Satgas Evaluasi Perizinan dan Aktivitas Ilegal di Kawasan Hutan yang bersifat partisipatif. Uli Artha Siagian menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil dalam Satgas ini untuk mencegah praktik *whitewashing* atau pemutihan dosa korporasi. Pernyataan tegas tersebut berupa:

*"Mekanisme ini harus bermuara pada pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat, bukan justru melanggengkan praktik ilegal sebagaimana terjadi pada Satgas PKH yang terbukti membiarkan perkebunan kelapa sawit ilegal terus berlangsung"* (KedaiPena, 2025).

WALHI membangun komunikasi intensif dengan Komisi IV DPR RI. WALHI telah berhasil meyakinkan para legislator dalam berbagai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan audiensi, bahwa banjir Sumatera adalah bukti kegagalan pengawasan negara. Keberhasilan lobi ini terlihat dari perubahan sikap Ketua Komisi IV DPR RI yaitu Titiek Soeharto. Titiek yang berasal dari partai pendukung pemerintah, secara terbuka mengadopsi narasi WALHI dalam menyikapi bencana ini. Ia menyatakan dengan tegas dalam sebuah audiensi:

*"Bencana hidrometeorologi di ujung Barat Indonesia ini bukan lagi sekedar anomali cuaca. Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Kita tidak bisa terus menerus menyalahkan curah hujan yang tinggi. Sementara kita menutup mata terhadap fakta di lapangan"* (Waspada, 2025).

Dukungan politik dari parlemen ini sangat krusial. Hasil konkret dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah pembentukan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan oleh Komisi IV DPR RI (detikNews 2025). Panja ini berfungsi sebagai alat politik dan hukum yang memberi wewenang kepada DPR untuk memanggil perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam data WALHI secara paksa. Selain itu, Panja juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah secara berkala.

Dinamika advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam merespons krisis banjir bandang di Sumatera pada akhir tahun 2025 dianalisis menggunakan kerangka *Public Affairs* dari Harris dan Fleisher (2016). Kerangka ini menjelaskan rangkaian proses yang dimulai dari manajemen *Public Affairs* secara luas, diikuti oleh *Policy Advocacy*, dan diakhiri dengan *Political Lobbying* sebagai tindakan taktis. WALHI menjalankan *Policy Advocacy* untuk mengubah persepsi publik dari paradigma antroposentrisme menuju ekosentrisme. Upaya ini dilakukan dengan mengarahkan komunikasi pada proses edukasi publik dan pemerintah mengenai kausalitas ilmiah serta politis dari bencana tersebut. Penggunaan narasi "Bencana Ekologis" bertujuan menuntut pengakuan hak ekosistem dan menolak argumen yang menganggap peristiwa tersebut sebagai faktor cuaca semata.

Implementasi strategi ini berlanjut pada tahap *political lobbying* yang melibatkan interaksi langsung dengan otoritas politik untuk memengaruhi keputusan pemerintah. Harris dan Fleisher (2016) menekankan bahwa lobi politik yang efektif memerlukan kredibilitas data dan hubungan yang konsisten. WALHI melakukan lobi intensif kepada Komisi IV DPR RI dengan menyajikan fakta deforestasi seluas 1,4 juta hektare yang melibatkan 631 perusahaan. Keberhasilan lobi ini terlihat saat Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengadopsi data tersebut dan menyatakan bahwa krisis di Sumatera merupakan peringatan keras bagi tata kelola lingkungan. Pernyataan ini menunjukkan keberhasilan WALHI dalam memberikan nilai organisasi ke dalam diskursus elit politik melalui jalur legislatif.

Praktik lobi politik WALHI juga menasar pihak eksekutif melalui desakan langsung kepada Kementerian Kehutanan. Tindakan taktis ini mendorong Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas lebih dari satu juta hektar pada Desember 2025. WALHI memastikan setiap langkah lobi didukung oleh bukti empiris yang kuat, seperti data forensik kayu sisa pembalakan yang ditemukan di lokasi bencana. WALHI menuntut pembentukan Satgas Evaluasi Perizinan yang partisipatif dan melibatkan masyarakat sipil untuk menjamin akuntabilitas jangka panjang. Keseluruhan aksi ini mencerminkan penerapan strategi *Public Affairs* yang terintegrasi untuk

mengintervensi kebijakan publik dan mengawal perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis terhadap respons WALHI mengenai banjir bandang di Sumatera pada akhir 2025 menunjukkan pola strategi komunikasi politik yang menggunakan model advokasi public affairs terintegrasi. Mekanisme strategi ini bekerja melalui transformasi wacana menjadi langkah kebijakan konkret dalam dua tahap sinergis. Tahap pertama melibatkan pengalihan narasi publik dari sudut pandang antroposentris ke arah ekosentris. WALHI membingkai peristiwa tersebut sebagai bencana ekologis yang berakar pada kegagalan tata kelola lingkungan secara konsisten melalui media daring. Tahap kedua menggunakan pergeseran wacana publik tersebut sebagai posisi tawar politik untuk melakukan lobi langsung. Langkah ini berujung pada lahirnya *output* kebijakan seperti pencabutan izin pengelolaan hutan dan pembentukan panitia kerja investigatif di DPR RI. Secara praktis, temuan ini memberikan gambaran bagi organisasi masyarakat sipil mengenai cara mengintegrasikan pembingkaian wacana dengan lobi politik untuk mendorong perubahan kebijakan substantif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada periode krisis akut serta sudut pandang komunikator utama. Sifat kualitatif dari studi ini menyebabkan temuan bersifat kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini belum memotret keberlanjutan dampak kebijakan dalam jangka panjang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Winda Dwi Astuti Zebua, S.Kom.I, M.Si selaku dosen pembimbing utama atas bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan yang diberikan selama proses pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Duhé, S. (2022). *Business for communicators*. Routledge.
- Fasmalia, P., & Angela, D. (2024). Walhi's strategy to fight for justice in environmental permit cancellation: Case study of construction of PLTU Tanjung Jati A Cirebon. *Journal La Sociale*, 5(4), 936–950. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i4.1219>
- Harris, P., & Fleisher, C. S. (2017). *The SAGE handbook of international corporate and public affairs*. SAGE Publications.

- Toboroza, P. A., Amaliatulwalidain, & Febriyanti, D. (2025). Peran WALHI Sumatera Selatan dalam mengadvokasi masalah banjir di Kota Palembang tahun 2024. *The Journal of Social and Government*, 6(1), 87–98. <https://doi.org/10.55314/tsg.v6i1.897>
- Wahyuni, N., Sabrani, A., Hawilda, L., Pohan, N. L., Putri, S. A., & Suhaila, S. (2024). Advokasi stockpile batubara ilegal oleh WALHI di Kota Padang. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), 16–27. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3657>
- DetikNews. (2025, December 4). Komisi IV DPR bentuk panja alih fungsi lahan buntut bencana di Sumatera. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-8243893/komisi-iv-dpr-bentuk-panja-alih-fungsi-lahan-buntut-bencana-di-sumatera>
- Waspada. (2025, December 5). Titiek Soeharto tegaskan banjir di Sumatera tidak bisa hanya salahkan hujan deras. *Waspada.co.id*. <https://waspada.co.id/titiek-soeharto-tegaskan-banjir-di-sumatera-tidak-bisa-hanya-salahkan-hujan-deras/>
- CNBC Indonesia. (2025, December 6). Menhut Raja Juli buka data deforestasi hutan RI, faktanya: Makin parah. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251206032341-128-691644/menhut-raja-juli-buka-data-deforestasi-hutan-ri-faktanya-makin-parah>
- WALHI. (2025, December 9). WALHI desak Kementerian Kehutanan tindak aktivitas ilegal dan cabut perizinan berusaha perusahaan penyebab banjir Sumatera. *WALHI*. <https://www.walhi.or.id/walhi-desak-kementerian-kehutanan-tindak-aktivitas-ilegal-dan-cabut-perizinan-berusaha-perusahaan-penyebab-banjir-sumatera>
- KedaiPena. (2025, December 10). Walhi desak Raja Juli bentuk satgas evaluasi perizinan dan aktivitas ilegal kawasan hutan. *Kedai Pena*. <https://www.kedaipena.com/walhi-desak-raja-juli-bentuk-satgas-evaluasi-perizinan-dan-aktivitas-ilegal-kawasan-hutan/>
- Mongabay. (2025, December 14). Opini: Bencana banjir Sumatera dan mendesaknya UU kehutanan baru yang transformatif. *Mongabay.co.id*. <https://mongabay.co.id/2025/12/14/bencana-banjir-sumatera-dan-mendesaknya-uu-kehutanan-baru-yang-transformatif/>
- BPMI Setpres. (2025, December 15). Pemerintah cabut 22 PBPH seluas lebih dari 1 juta hektare. *Presidenri.go.id*. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-cabut-22-pbph-seluas-lebih-dari-1-juta-hektare/>
- Media Indonesia. (2025, December 23). Berencana deforestasi untuk pangan dan energi, pemerintah abai upaya perbaikan iklim. *Mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/730968/berencana-deforestasi-untuk-pangan-dan-energi-pemerintah-abai-upaya-perbaikan-iklim>
- Mistar.id. (2025, December 23). WALHI sebut longsor-banjir di Sumatera bukan takdir, faktornya kerusakan hutan. *Mistar.id*. <https://mistar.id/news/medan/walhi-sebut-longsorbanjir-di-sumatera-bukan-takdir-faktornya-kerusakan-hutan>
- AntaraNews. (2026, January 6). Banjir Sumatera: Ketika alam “bicara” lewat sisa-sisa tubuhnya. *Antaranews.com*. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/480268/banjir-sumatera-ketika-alam-bicara-lewat-sisa-sisa-tubuhnya>
- BETAHITA. (2026, January 6). Walhi: Deforestasi dan hukum yang lemah picu bencana di Sumut. *Betahita*. <https://betahita.id/news/detail/11718/walhi-deforestasi-dan-hukum-yang-lemah-picu-bencana-di-sumut.html?v=1767653458>